

**STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PADA
TANAMAN PADI DI KECAMATAN SIBULUE KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muh. Asril

NPP. 32.0896

Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.0896@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Cynthia Febri Sri Indarti, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Although the distribution of subsidized fertilizer has been technically regulated through the e-RDKK system and government policies, in practice, issues such as scarcity, uneven distribution, and weak coordination and supervision still occur, particularly in Sibulue Subdistrict, Bone Regency. This indicates a gap between national policy and its local-level implementation. **Purpose:** This study aims to analyze the strategy of Collaborative Governance in the management of subsidized fertilizer distribution for rice crops in Sibulue Subdistrict, Bone Regency. **Method:** This research uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. **Results:** The findings show that the Collaborative Governance strategy has been implemented through coordination forums, socialization, and routine evaluation among stakeholders. The study reveals that the dimensions of collaborative governance—such as institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes—have been applied quite effectively, although there are still challenges such as limited infrastructure, data inconsistencies, and potential conflicts among actors. **Conclusion:** The implementation of Collaborative Governance in managing the distribution of subsidized fertilizer in Sibulue Subdistrict has proven to be moderately effective. However, it needs to be strengthened through improved human resource capacity, data transparency, and more intensive face-to-face dialogue to ensure more optimal and sustainable collaboration among stakeholders.*

Keywords: *Collaborative Governance, Distribution, Subsidized Fertilizer*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun distribusi pupuk bersubsidi telah diatur secara teknis melalui sistem e-RDKK dan regulasi pemerintah, kenyataannya di lapangan masih terjadi kelangkaan, distribusi yang tidak merata, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan, khususnya di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di tingkat lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Collaborative Governance dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi pada tanaman padi di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Collaborative Governance telah diterapkan melalui forum koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi

rutin antar pemangku kepentingan. Dalam dimensi yang digunakan dalam penelitian ditemukan bahwa penerapan dimensi collaborative governance seperti desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi berjalan cukup efektif, meskipun masih terkendala keterbatasan infrastruktur, ketidaksesuaian data, dan potensi konflik antar aktor. **Kesimpulan:** Penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sibulue menunjukkan efektivitas yang cukup baik, namun perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi data, serta dialog tatap muka yang lebih intensif agar kolaborasi antar aktor semakin optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Distribusi, Pupuk Bersubsidi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan modern (Jacob et al:2025). Pada zaman ini dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kompetensi strategis dalam menjawab tantangan globalisasi dan implementasi teknologi digital (Valdivia & López: 2022). Pertanian merupakan sektor vital dalam kehidupan manusia karena berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Di Indonesia, sektor ini berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional, terutama dalam menyediakan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk. Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai salah satu strategi utama untuk mendukung produktivitas pertanian dan meringankan beban biaya produksi bagi petani. Keterbatasan anggaran sama halnya juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmawaty, Jeddawi, & Lukman, (2020) bahwa salah satu kendala belum tercapainya sasaran Proses Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Pemerintah adalah minimnya alokasi anggaran.

Pupuk bersubsidi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi ini bertujuan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau melalui mekanisme distribusi yang terstruktur mulai dari e-RDKK hingga penyaluran oleh kios resmi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidaksesuaian data kebutuhan, distribusi yang tidak merata, hingga praktik curang dan lemahnya pengawasan.

Di Kabupaten Bone, yang dikenal memiliki potensi pertanian besar, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi menjadi persoalan yang kian kompleks. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bone, alokasi pupuk bersubsidi jauh di bawah kebutuhan riil petani berdasarkan RDKK. Kelangkaan pupuk, harga yang melebihi HET, dan praktik penyimpangan dalam penyaluran menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Dampaknya, petani mengalami keterlambatan dalam masa tanam, penurunan hasil panen, dan risiko kerugian ekonomi yang signifikan.

Situasi ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang lebih kolaboratif dalam distribusi pupuk bersubsidi. Collaborative governance yang melibatkan petani, pemerintah, dan sektor swasta secara aktif dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam distribusi pupuk. Terlebih, penguatan mekanisme pengawasan dan

peningkatan akurasi data kebutuhan pupuk menjadi elemen penting agar subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mampu mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun pemerintah telah mengatur distribusi pupuk bersubsidi secara rinci melalui sistem e-RDKK dan kebijakan harga eceran tertinggi, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan. Berbagai studi sebelumnya banyak menyoroti ketidaktepatan distribusi pupuk secara nasional, namun masih minim penelitian yang secara spesifik membahas ketimpangan distribusi pupuk bersubsidi dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Bone.

Kesenjangan penelitian terlihat dari belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis efektivitas distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan pendekatan collaborative governance, yang menggabungkan peran aktif pemerintah daerah, distributor, serta kelompok tani dalam pengambilan keputusan dan pengawasan distribusi. Padahal, pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai permasalahan klasik seperti kelangkaan pupuk, distribusi yang tidak merata, serta lemahnya pengawasan terhadap pengecer.

Lebih lanjut, wilayah seperti Kecamatan Sibulue di Kabupaten Bone yang merupakan salah satu sentra produksi padi, menjadi contoh konkret dari kegagalan sistem distribusi yang tidak adaptif terhadap dinamika kebutuhan petani. Masalah kelangkaan, kuota yang terus menurun, serta tidak seimbangnya jumlah pupuk yang dibutuhkan dan yang tersedia menjadi tantangan besar dalam mendorong produktivitas sektor pertanian lokal. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai strategi penguatan distribusi pupuk bersubsidi dengan fokus pada sinergi aktor dalam tata kelola kolaboratif guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Pengelolaan Distribusi Pupuk Bersubsidi.

Penelitian Pertama oleh Nofianti, T., Yulianti, Y., Sukesi, K., dan Purnomo, M. (2024) berjudul "Strategi Resiliensi Petani terhadap Kelangkaan Pupuk Bersubsidi: Kasus Rumah Tangga Petani Padi di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ketahanan petani dalam menghadapi kelangkaan pupuk bersubsidi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani cenderung mengandalkan jaringan sosial, diversifikasi usaha tani, dan pemanfaatan pupuk alternatif untuk tetap menjaga keberlangsungan produksi. Strategi ini menunjukkan adanya kolaborasi antara petani, kelompok tani, dan penyuluh pertanian dalam menghadapi persoalan distribusi.

Penelitian Kedua oleh Mardhiah, M., Hasan, M. Y., dan Hakim, M. M. (2009) berjudul "Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Usahatani Padi Sawah Berdasarkan Tipologi Lahan di Provinsi Sumatera Selatan". Penelitian ini menganalisis efektivitas distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan klasifikasi tipologi lahan dan jenis komoditas yang dibudidayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi belum sepenuhnya sesuai kebutuhan petani di setiap tipologi lahan, dengan keterlambatan distribusi dan kuota yang tidak proporsional sebagai masalah utama. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya sistem distribusi berbasis data lahan aktual.

Penelitian Ketiga oleh Suniarti, S. (2024) berjudul "Analisis Mekanisme Distribusi Pupuk

Bersubsidi pada Usaha Tani Padi Sawah: Studi Kasus Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara". Penelitian ini menelusuri mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi petani di tingkat lapangan. Hasil penelitian mengungkap adanya ketidaksesuaian data penerima dan lemahnya pengawasan distribusi dari pemerintah desa dan kelompok tani. Peneliti merekomendasikan peningkatan transparansi dan digitalisasi dalam proses distribusi untuk meminimalkan penyimpangan.

Penelitian Keempat oleh Sriski, G. S., Taridala, S. A. A., dan Abdullah, W. G. (2024) berjudul "Analisis Saluran Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Petani Padi Sawah di Desa Konawehea, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara". Penelitian ini mengevaluasi efektivitas saluran distribusi pupuk berdasarkan prinsip 6 tepat (tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi relatif efektif namun masih terkendala pada aspek tepat waktu dan pengawasan di tingkat pengecer. Studi ini menyarankan perbaikan koordinasi antar lembaga dalam rantai distribusi.

Penelitian Kelima oleh Djemma, L. A., Nuryanti, D. M., dan Zainuddin, A. (2024) berjudul "Efektivitas Pendistribusian Program Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu". Penelitian ini menilai efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani padi di wilayah studi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti menemukan bahwa distribusi belum sepenuhnya optimal karena kendala pada sistem alokasi dan ketidaksesuaian data petani. Studi ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, distributor, dan kelompok tani dalam mengimplementasikan tata kelola distribusi yang akuntabel dan partisipatif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam memahami pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi melalui pendekatan Collaborative Governance, yang belum banyak dikaji secara spesifik pada konteks lokal di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti aspek teknis, administratif, atau evaluatif dari distribusi pupuk, penelitian ini justru menempatkan tata kelola kolaboratif sebagai kerangka utama untuk menelaah keterlibatan berbagai aktor mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pengecer, hingga petani dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi distribusi pupuk bersubsidi.

Penelitian oleh Nofianti et al. (2024) berfokus pada strategi resiliensi petani terhadap kelangkaan pupuk, dengan menekankan bagaimana petani mengandalkan jaringan sosial, diversifikasi usaha, dan alternatif pemupukan untuk bertahan. Meskipun terdapat unsur kerja sama, kajian tersebut belum menyentuh aspek formal dan institusional dari kolaborasi yang terorganisir secara sistematis dalam pengelolaan distribusi. Penelitian ini memperluas cakupan dengan menelaah bagaimana kolaborasi difasilitasi, diformalkan, dan dijaga secara berkelanjutan melalui forum partisipatif dan struktur pengawasan lintas sektor.

Sementara itu, penelitian Mardhiah et al. (2009) mengkaji distribusi pupuk berdasarkan tipologi lahan dan efektivitas distribusi dari sisi kuantitas dan kesesuaian jenis pupuk. Meskipun relevan dalam aspek evaluasi kebutuhan, pendekatan tersebut belum menggambarkan dinamika sosial, konflik kepentingan, ataupun peran komunikasi dan kepemimpinan dalam proses kolaborasi. Penelitian ini melengkapi kekurangan tersebut dengan menjelaskan bagaimana ketimpangan distribusi dapat diatasi melalui penguatan sinergi kelembagaan dan fasilitasi oleh pemimpin lokal.

Penelitian oleh Suniarti (2024) menelusuri mekanisme distribusi dan menyoroti hambatan teknis seperti ketidaksesuaian data dan lemahnya pengawasan. Namun, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada identifikasi masalah di lapangan tanpa kerangka teoritis yang mendalam. Penelitian ini justru menempatkan Collaborative Governance sebagai fondasi utama dalam memahami dinamika tersebut, termasuk bagaimana konflik diatasi, komitmen dibangun, dan hasil antara dari kolaborasi diukur secara sistematis.

Adapun penelitian Sriski et al. (2024) menilai efektivitas distribusi berdasarkan prinsip “6 tepat” yang bersifat teknis, seperti tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga. Kajian tersebut belum mengkaji proses komunikasi, forum dialog, atau peran kepemimpinan fasilitatif sebagai instrumen koordinasi. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghubungkan efektivitas distribusi dengan keberfungsian komunikasi antar pemangku kepentingan serta desain institusional yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian Djemma et al. (2024) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, distributor, dan kelompok tani dalam efektivitas distribusi. Namun, pendekatannya masih bersifat deskriptif kuantitatif tanpa penjabaran mendalam mengenai dimensi proses kolaboratif seperti komitmen terhadap proses, saling pengertian, dan kepemimpinan adaptif. Dalam hal ini, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggambarkan secara rinci bagaimana setiap dimensi kolaborasi bekerja dan berkontribusi terhadap pencapaian distribusi yang lebih tepat sasaran dan efisien.

Dengan demikian, kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada kerangka analitis dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas distribusi pupuk bersubsidi secara deskriptif, tetapi juga menyajikan analisis mendalam mengenai proses kolaboratif antar aktor, bagaimana kepercayaan dibangun, konflik dikelola, dan hasil-hasil sementara dari proses kolaborasi diidentifikasi. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi yang praktis untuk penguatan tata kelola distribusi pupuk yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan melalui forum koordinatif dan kepemimpinan fasilitatif, menjadikannya berbeda secara signifikan dari studi-studi sebelumnya.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Collaborative Governance dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi pada tanaman padi di kecamatan sibulue Kabupaten Bone.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan cara yang lebih holistik.

Metode penelitian kualitatif, yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggabungkan beberapa sumber melalui triangulasi, serta menganalisis data secara induktif, dengan fokus pada makna daripada generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42). Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Selanjutnya menurut Fatimah (2019) mengatakan bahwa Pendekatan kualitatif lebih cenderung digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial karena dalam penelitian kualitatif data dan penelitian lebih ditekankan. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis strategi Collaborative Governance dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi pada tanaman padi di kecamatan sibulue Kabupaten Bone.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna dan konteks sosial yang tidak bisa dijelaskan secara kuantitatif. Setiap penelitian kualitatif dalam pemerintahan dapat memiliki variasi dalam desainnya, karena disesuaikan dengan sifat alami dari penelitian kualitatif itu sendiri yang bersifat dinamis, di mana fenomena dapat muncul secara tiba-tiba sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017:190).

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugiyono (2016:225) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lainnya. Informan penelitian, seperti yang disampaikan oleh Moleong (2015:163), adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis strategi Collaborative Governance dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi pada tanaman padi di kecamatan sibulue Kabupaten Bone. Peneliti menggunakan Teori Collaborative Governance (Ansell and Gash: 2007), terdapat 5 dimensi dalam teori ini yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Awal (Starting Condition)
2. Institutional Design (Desain Institusional)
3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif), dan
4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)
5. Hasil menengah (Intermediate Outcomes).

3.1 Strategi Collaborative Governance diterapkan Dalam Pengelolaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone

1. Starting Condition (kondisi awal)

a. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan dan potensi yang dimiliki oleh para aktor dalam proses kolaborasi. Sumber daya dalam distribusi pupuk bersubsidi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, sumber daya manusia yang berkaitan dengan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan para aktor seperti pemerintah, penyuluh, pengecer, dan petani. Kedua, sumber daya finansial berupa anggaran yang mendukung proses pengadaan dan penyaluran pupuk. Ketiga, sumber daya informasi yang meliputi data

kebutuhan pupuk, jadwal distribusi, dan kondisi lapangan yang menunjang perencanaan dan komunikasi. Terakhir, sumber daya fisik dan infrastruktur, seperti sarana distribusi dan akses transportasi yang mendukung kelancaran penyaluran pupuk ke petani. Pengelolaan sumber daya yang efektif akan mendukung kelancaran dialog antar aktor dan mengoptimalkan kinerja kolaborasi.

Dalam hal ini, kondisi awal yang dilihat dari segi ketersediaan dan pengelolaan sumber daya menjadi faktor penting yang akan menentukan apakah kolaborasi dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik. Ketersediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya dalam distribusi pupuk. Misalnya, distribusi yang lebih tertata, pengawasan yang lebih efektif, dan pencatatan yang lebih sistematis. Semua itu menunjukkan bahwa sumber daya dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.

Kondisi sumber daya dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun alokasi pupuk sudah disesuaikan dengan kebutuhan, distribusinya belum merata akibat hambatan geografis dan sistem logistik yang belum optimal. Tenaga kerja tersedia cukup, namun koordinasi antara distributor, pengecer, dan petani masih kurang, yang berdampak pada efektivitas distribusi. Oleh karena itu, sumber daya baik yang bersifat fisik seperti pupuk dan logistik, maupun non-fisik seperti komunikasi dan koordinasi antar aktor perlu ditingkatkan agar distribusi pupuk bersubsidi lebih efisien dan optimal. Hal ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi dalam pengembangan kompetensi yang dapat berdampak pada rendahnya kinerja dan kualitas layanan publik (Eaton et al: 2022).

Masih terdapat keterbatasan sumber daya, dari segi jumlah tenaga penyuluh pertanian maupun fasilitas penunjang, seperti akses internet di beberapa desa. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran proses input data RDKK dan penebusan pupuk bersubsidi secara elektronik. Selain itu, tidak semua petani memiliki pemahaman yang baik terkait prosedur pengajuan pupuk bersubsidi. Sama halnya dengan penelitian oleh Kaligis & Mansyur (2020) yang menyatakan salah satu kendala internal dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran yaitu keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.

b. Konflik

Konflik dalam proses distribusi pupuk bersubsidi mengacu pada adanya perbedaan kepentingan, miskomunikasi, atau ketimpangan akses antar aktor yang terlibat. Ketegangan semacam ini kerap muncul akibat kurangnya transparansi, distribusi yang tidak merata, hingga lemahnya koordinasi. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menghambat efektivitas kerja sama dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Teridentifikasi adanya perbedaan kepentingan, miskomunikasi, atau kendala dalam distribusi pupuk yang berpotensi menimbulkan konflik. Misalnya, soal alokasi pupuk, keterlambatan distribusi, atau ketidakjelasan data penerima.

Beberapa kendala utama dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone yakni keterlambatan pasokan, terutama saat permintaan sedang tinggi, yang menyebabkan ketegangan di lapangan. Selain itu, penyalahgunaan distribusi, seperti ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diterima dan alokasi yang sudah ditetapkan, juga menjadi masalah signifikan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani dan pengecer, serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem distribusi yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, Kepala Dinas Pertanian menyatakan bahwa upaya pengawasan dan koordinasi antara berbagai pihak terkait terus dilakukan, dengan tujuan agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih transparan, tepat

sasaran, dan efisien.

Masih ditemukan potensi konflik di lapangan yang berkaitan dengan keterbatasan pemahaman petani terhadap mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi. Ketidaksesuaian antara kebutuhan pupuk yang diajukan petani dengan alokasi yang diterima seringkali memicu keluhan dan ketidakpuasan. Selain itu, keterlambatan dalam proses input data RDKK akibat minimnya fasilitas penunjang, seperti jaringan internet yang tidak stabil di beberapa desa, turut memperbesar potensi terjadinya kesalahpahaman antara petani dengan pihak penyuluh maupun pengecer.

2. Institutional Design (desain institusioal)

a. Partisipasi Forum

Partisipasi forum dalam distribusi pupuk bersubsidi merujuk pada sejauh mana berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, penyuluh pertanian, pengecer, dan petani, berperan aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan distribusi. Keterlibatan semua aktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak terkait. Forum yang efektif memungkinkan terjalinnya komunikasi yang baik, penguatan koordinasi antar aktor, serta peningkatan transparansi dalam proses distribusi.

Dalam rangka memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone menyatakan bahwa pihaknya rutin mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti distributor, pengecer, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Salah satu forum utama yang dilakukan adalah pertemuan tahunan untuk evaluasi dan perencanaan distribusi, serta pertemuan berkala guna memastikan distribusi berjalan sesuai regulasi dan mengatasi kendala yang muncul di lapangan.

Koordinasi distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, distributor, pengecer, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Proses ini dilakukan melalui rapat evaluasi tahunan, pertemuan berkala, dan rapat teknis untuk membahas mekanisme distribusi dan kendala yang dihadapi. Pengecer juga aktif dalam pertemuan informal dengan petani untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi. Sosialisasi di tingkat desa turut dilakukan agar petani memahami prosedur dan ketentuan terkait pupuk bersubsidi.

Adanya partisipasi aktif berbagai pihak dalam forum koordinasi distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone. Partisipasi ini terlihat dalam rapat evaluasi tahunan, pertemuan berkala, dan rapat teknis yang melibatkan pemerintah daerah, distributor, pengecer, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Pengecer juga aktif dalam pertemuan informal dengan petani untuk mendengarkan keluhan. Selain itu, sosialisasi di tingkat desa rutin dilakukan untuk memastikan petani memahami prosedur dan ketentuan pupuk bersubsidi, menunjukkan upaya kolektif dalam menjaga kelancaran distribusi.

b. Aturan Dasar

Dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi, aturan dasar menjadi landasan penting yang mengatur peran dan tanggung jawab tiap aktor yang terlibat. Keberadaan regulasi ini memastikan jalannya kolaborasi berjalan sesuai prosedur, transparan, dan terarah. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan dan peraturan yang berlaku dijadikan acuan dalam pelaksanaan distribusi di tingkat daerah, serta bagaimana aktor-aktor menjalankan tugasnya berdasarkan aturan tersebut.

Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi. Aturan ini memuat ketentuan terkait penyaluran, syarat penerima, serta peran tiap pihak. Penyaluran pupuk juga didasarkan pada e-RDKK, yaitu sistem data kebutuhan kelompok tani yang digunakan untuk memastikan alokasi pupuk lebih tepat, efisien, dan sesuai kondisi di lapangan.

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam penerapan aturan dasar terkait proses input data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan penebusan pupuk bersubsidi secara elektronik. Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang tidak memadai serta akses internet yang terbatas di beberapa desa secara langsung menghambat kelancaran proses ini. Selain itu, masih banyak petani yang belum memahami dengan baik prosedur pengajuan pupuk bersubsidi, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sosialisasi dan edukasi untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas aturan yang ada.

c. Transparansi

Transparansi dalam distribusi pupuk bersubsidi memerlukan keterbukaan informasi kepada seluruh pihak terkait, mulai dari alokasi, jadwal penyaluran, hingga harga yang ditetapkan. Keterbukaan ini penting agar proses distribusi berjalan akuntabel, mengurangi potensi penyimpangan, dan membangun kepercayaan antar aktor. Dalam konteks penelitian ini, transparansi dievaluasi dari sejauh mana informasi terkait pupuk disampaikan secara terbuka kepada petani, pengecer, dan pihak pelaksana di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Sistem pengawasan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone telah diterapkan secara terstruktur guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan rutin, baik dalam bentuk inspeksi langsung ke pengecer maupun evaluasi berkala yang didasarkan pada laporan dari penyuluh pertanian. Selain itu, pemanfaatan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) juga menjadi instrumen penting dalam pengendalian distribusi. Sistem ini memastikan bahwa pupuk hanya disalurkan kepada petani yang berhak, berdasarkan data yang telah diverifikasi sebelumnya. Dengan adanya mekanisme pengawasan ini, distribusi pupuk bersubsidi diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Observasi lapangan menunjukkan adanya tantangan transparansi dalam proses input data RDKK dan penebusan pupuk bersubsidi. Meskipun sistem elektronik, kurangnya pemahaman petani mengenai alur dan status pengajuan mereka menyebabkan informasi ketersediaan dan alokasi pupuk seringkali tidak sampai secara menyeluruh. Hal ini menciptakan ketidakpastian di kalangan petani dan menghambat efektivitas sistem.

d. Forum terbatas

Dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi, forum terbatas menjadi wadah penting bagi aktor-aktor kunci untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta menyelaraskan kepentingan dalam proses distribusi. Forum ini berfungsi sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan pengambilan keputusan secara bersama. Penelitian ini melihat bagaimana forum-forum terbatas, seperti rapat koordinasi antar instansi terkait, dimanfaatkan dalam membangun kolaborasi, menyelesaikan permasalahan di lapangan, serta memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan melalui pembentukan tim khusus seperti tim pengawas dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Tim ini terdiri dari unsur

dinas pertanian, penyuluh, dan aparat terkait, yang bekerja sama dalam memantau distribusi secara menyeluruh serta menangani potensi penyimpangan. Keberadaan struktur pengawasan ini memperkuat integritas dan memastikan distribusi berjalan sesuai regulasi.

Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dilakukan melalui pembentukan tim khusus, seperti tim pengawas dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Tim ini, yang terdiri dari unsur dinas pertanian, penyuluh, dan aparat terkait, menjadi forum terbatas yang efektif untuk memantau distribusi secara menyeluruh dan menangani potensi penyimpangan. Keberadaan struktur pengawasan ini memperkuat integritas dan memastikan distribusi berjalan sesuai regulasi.

3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif)

a. Memahami konteks

Dalam proses kolaborasi, peran seorang pemimpin tidak hanya sebatas mengarahkan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan. Kemampuan untuk membaca situasi, mengenali kebutuhan para pihak, serta memahami dinamika yang terjadi menjadi kunci dalam menciptakan kerja sama yang efektif. Pemahaman terhadap konteks ini memungkinkan pemimpin mengambil langkah yang tepat, responsif, dan sesuai dengan kondisi lokal yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Pimpinan di Kabupaten Bone memiliki peran sebagai fasilitator yang efektif dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi. Pemahaman mereka yang mendalam terhadap regulasi dan mekanisme distribusi, serta kemampuannya dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, menunjukkan penerapan Facilitative Leadership yang baik. Koordinasi yang intens dengan penyuluh, pengecer, dan kelompok tani memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Hal ini mencerminkan keberhasilan pimpinan dalam menciptakan kolaborasi yang produktif, serta adaptasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemahaman konteks yang mendalam dari pimpinan di Kabupaten Bone sangat mendukung pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi. Pimpinan menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan mekanisme distribusi, serta kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Koordinasi intensif dengan penyuluh, pengecer, dan kelompok tani memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Ini mencerminkan keberhasilan pimpinan dalam menciptakan kolaborasi produktif dan adaptasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

b. Kompetensi proses tugas

Kompetensi proses tugas merupakan kemampuan individu atau pemangku kebijakan dalam menjalankan tahapan pekerjaan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, kompetensi ini mencakup pemahaman alur distribusi, pengelolaan data petani, koordinasi antar pihak, serta pengawasan agar proses berjalan sesuai ketentuan. Kemampuan ini penting untuk memastikan setiap tahap dilakukan secara sistematis, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Kompetensi proses tugas dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi telah dijalankan secara optimal oleh pihak terkait. Hal ini tercermin dari kemampuan pelaksana dalam menerapkan strategi yang tepat, seperti memperkuat sistem e-RDKK untuk mendukung pendataan kebutuhan petani secara akurat, serta menjalin koordinasi yang baik dengan distributor dan pengecer. Selain itu, upaya peningkatan pengawasan juga menunjukkan adanya pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas pengawasan distribusi. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksana memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan proses tugas sesuai dengan tanggung jawabnya guna memastikan kelancaran dan ketepatan distribusi pupuk bersubsidi.

Kompetensi proses tugas dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi telah optimal. Hal ini terlihat dari kemampuan pelaksana dalam menerapkan strategi yang tepat, seperti memperkuat sistem e-RDKK untuk pendataan kebutuhan petani yang akurat, serta menjalin koordinasi yang baik dengan distributor dan pengecer. Upaya peningkatan pengawasan juga mencerminkan pemahaman dan ketepatan dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, pelaksana memiliki kompetensi memadai untuk memastikan kelancaran dan ketepatan distribusi pupuk bersubsidi.

4. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

a. Dialog Tatap Muka

Dalam kolaborasi antar aktor, dialog tatap muka menjadi elemen penting untuk membangun komunikasi yang efektif dan saling memahami. Melalui pertemuan langsung, para pihak dapat bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, dan menyelesaikan perbedaan secara terbuka. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, dialog tatap muka memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih intens, memperkuat kerja sama, dan memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dialog tatap muka menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung kelancaran distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone. Rapat koordinasi secara rutin dilakukan antara dinas pertanian, distributor, pengecer, dan penyuluh untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme dan ketentuan distribusi. Di sisi lain, pertemuan langsung dengan kelompok tani, baik melalui sosialisasi di desa maupun forum kelompok tani, menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan petani. Melalui dialog ini, petani diberikan pemahaman terkait prosedur distribusi serta dapat menyampaikan langsung keluhan atau masukan yang mereka alami di lapangan. Pendekatan ini juga memperkuat koordinasi dan memastikan distribusi pupuk berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Dialog tatap muka sangat penting untuk kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. Rapat koordinasi rutin antar pemangku kepentingan (Dinas Pertanian, distributor, pengecer, penyuluh) memastikan pemahaman yang sama tentang mekanisme distribusi. Selain itu, pertemuan langsung dengan kelompok tani menjadi ruang komunikasi terbuka, tempat petani mendapat informasi dan menyampaikan keluhan. Pendekatan ini memperkuat koordinasi dan memastikan distribusi pupuk tepat waktu serta sesuai kebutuhan.

b. Saling pengertian

Dalam proses kolaborasi, saling pengertian menjadi dasar penting untuk menciptakan kerja sama yang harmonis antar aktor. Saling pengertian mencerminkan adanya kesadaran dan penerimaan terhadap peran, tanggung jawab, serta kondisi masing-masing pihak. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, hal ini terlihat dari bagaimana dinas pertanian, penyuluh, pengecer, dan petani mampu memahami satu sama lain, membangun komunikasi yang terbuka, dan bekerja sama dalam menghadapi kendala di lapangan. Dengan adanya saling pengertian, proses distribusi menjadi lebih efektif dan potensi konflik dapat diminimalisir.

Sosialisasi yang rutin menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait regulasi, mekanisme distribusi, dan pentingnya

ketepatan sasaran agar pupuk sampai kepada petani yang berhak. Kepala Dinas Pertanian menekankan bahwa kompetensi dalam komunikasi dan penyuluhan sangat diperlukan untuk memastikan informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan mekanisme distribusi merupakan kunci agar distribusi pupuk dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan program pemerintah.

Sosialisasi rutin menjadi strategi utama untuk mencapai saling pengertian di antara pemangku kepentingan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan informasi regulasi, mekanisme distribusi, dan pentingnya ketepatan sasaran agar pupuk sampai pada petani yang berhak. Observasi juga menggarisbawahi bahwa kompetensi komunikasi dan penyuluhan sangat diperlukan agar informasi dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, memastikan distribusi pupuk berjalan efektif dan tepat sasaran.

c. Komitmen terhadap Proses

Komitmen terhadap proses mencerminkan kesungguhan dan konsistensi para aktor dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses kolaborasi berlangsung. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, komitmen ini terlihat dari upaya aktif semua pihak baik dinas pertanian, penyuluh, pengecer, maupun petani dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, menjaga komunikasi, serta menyelesaikan hambatan yang muncul. Komitmen yang kuat memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Komitmen dari setiap pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi tercermin melalui berbagai tindakan nyata. Tindakan tersebut meliputi pengawasan yang ketat, evaluasi yang dilakukan secara berkala, serta penegakan regulasi guna memastikan proses distribusi berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Evaluasi yang rutin dilakukan memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menilai efektivitas distribusi serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Seluruh pihak menunjukkan komitmen yang sama dalam menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sebagai bentuk tanggung jawab bersama, agar distribusi pupuk tetap tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Komitmen kuat dari setiap pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi. Komitmen ini terlihat dari pengawasan ketat yang dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah penyimpangan. Selain itu, evaluasi berkala memungkinkan identifikasi masalah dan penilaian efektivitas distribusi di lapangan. Semua pihak juga menunjukkan komitmen dalam menindak tegas setiap pelanggaran, sebagai bentuk tanggung jawab bersama agar distribusi pupuk tetap tepat sasaran dan sesuai regulasi.

5. Intermediate Outcome (Hasil Menengah)

a. Hasil menengah

Indikator hasil menengah dalam kerangka Collaborative Governance merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai dampak dari interaksi dan kerja sama antar aktor yang terlibat, sebelum mencapai hasil akhir atau tujuan utama dari kebijakan. Hasil menengah merupakan output yang muncul dari proses kolaboratif, yang menunjukkan sejauh mana kolaborasi telah berhasil membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan jangka panjang.

Dalam konteks pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi, hasil menengah mencerminkan capaian-capaian sementara yang menunjukkan efektivitas koordinasi, kualitas komunikasi antar

aktor, munculnya rasa saling percaya, serta adanya peningkatan kapasitas kelembagaan atau perilaku kolaboratif. Indikator ini penting karena menjadi tolak ukur apakah kerja sama yang dibangun benar-benar membawa dampak positif terhadap pelaksanaan distribusi sebelum mengukur hasil akhirnya, yaitu distribusi yang adil, merata, dan tepat sasaran.

Dengan mengidentifikasi hasil menengah, peneliti dapat menilai apakah proses kolaborasi sudah berada di jalur yang benar dan mampu menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dari kebijakan tersebut.

Indikator hasil menengah ini mencakup peningkatan pemahaman tentang kebijakan distribusi, keterlibatan aktif antara pihak-pihak terkait, serta evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi dan mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan di lapangan.

Hasil kolaborasi dalam distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan sibulue Kabupaten Bone menunjukkan dampak positif yang nyata. Kerja sama antar pemangku kepentingan telah menghasilkan distribusi yang lebih tertata, tepat sasaran, dan sistematis. Akses petani terhadap pupuk meningkat, didukung oleh sistem pendataan dan alokasi yang berjalan baik. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat berhasil menekan potensi penyimpangan, sehingga distribusi berlangsung lebih transparan dan efektif.

Dampak positif nyata dari kolaborasi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Kerja sama antar pemangku kepentingan telah menghasilkan distribusi yang lebih tertata, tepat sasaran, dan sistematis. Hal ini terlihat dari peningkatan akses petani terhadap pupuk, didukung oleh sistem pendataan dan alokasi yang berjalan baik. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat berhasil menekan potensi penyimpangan, sehingga distribusi berlangsung lebih transparan dan efektif.

3.2 tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi Collaborative Governance dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone

1. Konflik

Konflik dalam proses distribusi pupuk bersubsidi mengacu pada adanya perbedaan kepentingan, miskomunikasi, atau ketimpangan akses antar aktor yang terlibat. Ketegangan semacam ini kerap muncul akibat kurangnya transparansi, distribusi yang tidak merata, hingga lemahnya koordinasi. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menghambat efektivitas kerja sama dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan strategi Collaborative Governance dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone berkaitan dengan keterlambatan pasokan, terutama pada saat permintaan tinggi, yang sering menimbulkan ketegangan di lapangan. Keterlambatan ini mempengaruhi kelancaran distribusi dan berpotensi mengganggu jadwal tanam petani. Selain itu, penyalahgunaan distribusi, seperti ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diterima petani dengan alokasi yang telah ditetapkan, juga menjadi hambatan signifikan. Hal ini menambah ketidakpuasan di kalangan petani dan pengecer, serta dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem distribusi yang ada.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait, termasuk distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan secara lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien. Meskipun tantangan tersebut cukup signifikan, upaya pengawasan dan koordinasi yang

terus dilakukan menunjukkan komitmen dalam mengatasi masalah dan memperbaiki proses distribusi di masa yang akan datang.

2. Aturan Dasar

Dalam tata kelola distribusi pupuk bersubsidi, aturan dasar menjadi landasan penting yang mengatur peran dan tanggung jawab tiap aktor yang terlibat. Keberadaan regulasi ini memastikan jalannya kolaborasi berjalan sesuai prosedur, transparan, dan ter-arah. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan dan peraturan yang berlaku dijadikan acuan dalam pelaksanaan distribusi di tingkat daerah, serta bagaimana aktor-aktor menjalankan tugasnya berdasarkan aturan tersebut.

Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 dan menggunakan sistem e-RDKK untuk memastikan alokasi yang tepat. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterlambatan pasokan, ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diterima dan alokasi yang telah ditetapkan, serta penyalahgunaan distribusi. Hal ini menyebabkan ketegangan antar aktor dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem distribusi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone menegaskan bahwa pengawasan dan koordinasi antar pihak terkait terus ditingkatkan untuk memastikan distribusi lebih transparan dan tepat sasaran.

3. Saling pengertian

Dalam proses kolaborasi, saling pengertian menjadi dasar penting untuk menciptakan kerja sama yang harmonis antar aktor. Saling pengertian mencerminkan adanya kesadaran dan penerimaan terhadap peran, tanggung jawab, serta kondisi masing-masing pihak. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, hal ini terlihat dari bagaimana dinas pertanian, penyuluh, pengecer, dan petani mampu memahami satu sama lain, membangun komunikasi yang terbuka, dan bekerja sama dalam menghadapi kendala di lapangan. Dengan adanya saling pengertian, proses distribusi menjadi lebih efektif dan potensi konflik dapat diminimalisir.

Pemangku kepentingan dalam distribusi pupuk bersubsidi memastikan pemahaman bersama dengan cara melakukan sosialisasi berkala kepada petani, pengecer, dan penyuluh pertanian. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait regulasi yang mengatur distribusi pupuk, mekanisme yang harus diikuti, serta pentingnya ketepatan sasaran agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Dengan adanya sosialisasi yang rutin, semua pihak yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur distribusi yang benar. Hal ini memerlukan kompetensi dalam komunikasi dan penyuluhan, karena informasi yang disampaikan harus jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan mekanisme distribusi menjadi kunci agar distribusi pupuk berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran.

4. Memahami konteks

Dalam proses kolaborasi, peran seorang pemimpin tidak hanya sebatas mengarahkan, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kondisi nyata di lapangan. Kemampuan untuk membaca situasi, mengenali kebutuhan para pihak, serta memahami dinamika yang terjadi menjadi kunci dalam menciptakan kerja sama yang efektif. Pemahaman terhadap konteks ini memungkinkan pemimpin mengambil langkah yang tepat, responsif, dan sesuai dengan kondisi lokal yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Terlihat bahwa pimpinan di Kabupaten Bone memiliki peran sebagai fasilitator yang efektif dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi. Pemahaman mereka yang mendalam terhadap regulasi dan mekanisme distribusi, serta kemampuannya dalam menyesuaikan kebijakan dengan

kondisi lokal, menunjukkan penerapan Facilitative Leadership yang baik. Koordinasi yang intens dengan penyuluh, pengecer, dan kelompok tani memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Hal ini mencerminkan keberhasilan pimpinan dalam menciptakan kolaborasi yang produktif, serta adaptasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

5. Komitmen terhadap Proses

Komitmen terhadap proses mencerminkan kesungguhan dan konsistensi para aktor dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama proses kolaborasi berlangsung. Dalam konteks distribusi pupuk bersubsidi, komitmen ini terlihat dari upaya aktif semua pihak—baik dinas pertanian, penyuluh, pengecer, maupun petani—dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, menjaga komunikasi, serta menyelesaikan hambatan yang muncul. Komitmen yang kuat memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Komitmen masing-masing pihak terhadap distribusi pupuk bersubsidi tercermin dalam beberapa tindakan nyata, antara lain melalui pengawasan yang ketat, evaluasi berkala, dan penegakan regulasi yang mendukung jalannya distribusi sesuai prosedur. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh bertujuan untuk memastikan bahwa proses distribusi tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan pihak terkait untuk menilai efektivitas distribusi dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Untuk lebih memastikan kepatuhan terhadap prosedur, semua pihak bekerja sama dalam menindak tegas setiap penyimpangan yang terjadi, agar distribusi pupuk bersubsidi tetap tepat sasaran. Semua langkah ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap kelancaran distribusi membutuhkan kerjasama yang solid dan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang ada.

3.3 solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi melalui pendekatan Collaborative Governance

1. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana strategi Collaborative Governance dapat ditingkatkan efektivitasnya dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi. Dalam konteks ini, penguatan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal menjadi langkah krusial dalam mendorong keberhasilan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah daerah, penyuluh, pengecer, dan petani. Sumber daya yang dimaksud meliputi empat aspek utama. Pertama, sumber daya manusia yang berperan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan distribusi, dan pendampingan kepada petani. Kedua, sumber daya finansial yang mendukung proses pengadaan serta kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi. Ketiga, sumber daya informasi yang mencakup akurasi data kebutuhan pupuk, jadwal distribusi, serta komunikasi lintas sektor. Terakhir, sumber daya fisik dan infrastruktur, seperti ketersediaan transportasi dan akses jalan ke wilayah pertanian.

Upaya penguatan sumber daya ini menjadi bagian dari solusi strategis untuk memperbaiki proses distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi melalui pendekatan Collaborative Governance, perlu diterapkan beberapa solusi yang menyangkut aspek sumber daya. Di antaranya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kolaboratif, penyediaan dukungan finansial seperti mekanisme pembiayaan awal bagi pengecer, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat alur komunikasi dan pelaporan, serta perbaikan infrastruktur distribusi di wilayah dengan akses terbatas. Dengan penguatan keempat

aspek tersebut, proses kolaborasi antar aktor diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di Kabupaten Bone.

2. Dialog tatap muka

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi, dialog tatap muka dapat dijadikan sebagai salah satu solusi kunci dalam pendekatan Collaborative Governance. Dialog ini menjadi wadah penting untuk menyatukan persepsi antar aktor yang terlibat, seperti pemerintah, distributor, penyuluh, pengecer, dan petani. Dengan adanya pertemuan langsung secara rutin, para pihak bisa menyampaikan informasi secara terbuka, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah strategis secara bersama-sama.

Peningkatan kualitas dialog tatap muka juga dapat mengurangi kesenjangan komunikasi antara pengambil kebijakan dan penerima manfaat, sekaligus memperkuat rasa saling percaya antar aktor. Solusi yang dapat diimplementasikan adalah dengan memperluas frekuensi pertemuan kelompok tani, membangun forum diskusi yang lebih partisipatif, serta mendigitalisasi sebagian komunikasi untuk mendukung koordinasi secara cepat.

Optimalisasi dialog tatap muka dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat implementasi Collaborative Governance dalam distribusi pupuk bersubsidi. Dengan meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi langsung, setiap aktor memiliki peluang lebih besar untuk memahami kondisi nyata di lapangan dan menyusun solusi yang tepat sasaran. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kelancaran distribusi pupuk, kepuasan petani sebagai penerima manfaat, serta pencapaian tujuan kebijakan subsidi secara lebih efektif dan efisien.

3. Komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses adalah salah satu elemen penting dalam mencapai efektivitas distribusi pupuk bersubsidi melalui Collaborative Governance. Komitmen ini tercermin dari kesungguhan dan konsistensi setiap aktor untuk menjalankan peran mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam distribusi pupuk bersubsidi, komitmen ini mengarah pada pengawasan yang ketat, evaluasi berkala, serta penegakan regulasi yang memastikan setiap tahap proses distribusi berjalan dengan baik.

Komitmen terhadap proses distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan tindakan aktif para aktor untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan distribusi berjalan sesuai dengan prosedur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bone dan Kepala Penyuluh Pertanian Kecamatan Sibulue menekankan pentingnya dialog dan koordinasi antara semua pihak untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Evaluasi berkala dan tindak lanjut terhadap hambatan yang muncul menjadi cara yang efektif untuk memastikan komitmen tetap terjaga.

Sebagai solusi, penguatan komitmen dapat dicapai melalui peningkatan kerjasama antara aktor dengan memperkuat sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan transparan, serta menyediakan pelatihan yang lebih intensif untuk setiap pihak yang terlibat dalam distribusi. Dengan adanya komitmen yang konsisten dan kerjasama yang solid, distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone dapat berjalan dengan lebih efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Partisipasi forum

Partisipasi forum dalam distribusi pupuk bersubsidi merujuk pada sejauh mana berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, penyuluh pertanian, pengecer, dan petani, berperan aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan distribusi. Keterlibatan semua aktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan

kebutuhan dan kepentingan seluruh pihak terkait. Forum yang efektif memungkinkan terjalannya komunikasi yang baik, penguatan koordinasi antar aktor, serta peningkatan transparansi dalam proses distribusi.

Koordinasi distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bone melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, distributor, pengecer, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Proses ini dilakukan melalui rapat evaluasi tahunan, pertemuan berkala, dan rapat teknis untuk membahas mekanisme distribusi dan kendala yang dihadapi. Pengecer juga aktif dalam pertemuan informal dengan petani untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi. Sosialisasi di tingkat desa turut dilakukan agar petani memahami prosedur dan ketentuan terkait pupuk bersubsidi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi Collaborative Governance dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Proses kolaboratif yang terjalin antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pengecer, dan kelompok tani telah membentuk dasar koordinasi yang baik dalam proses distribusi. Hal ini tercermin melalui adanya forum partisipatif, sosialisasi rutin, kepemimpinan fasilitatif, serta penguatan komitmen terhadap proses distribusi. Namun demikian, sejumlah hambatan seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, konflik kepentingan, dan kesenjangan informasi masih mengganggu optimalisasi kolaborasi di tingkat pelaksana.

Berbeda dengan hasil penelitian Nofianti et al. (2024) yang lebih menitikberatkan pada strategi adaptif petani secara individual dalam menghadapi kelangkaan pupuk, seperti diversifikasi usaha dan penggunaan pupuk alternatif, penelitian ini justru menunjukkan bahwa penguatan sistem kolaborasi antar aktor lebih efektif dalam menjawab persoalan sistemik. Di Kecamatan Sibulue, kerja sama lintas sektor memungkinkan petani tidak hanya bertahan secara mandiri, tetapi juga mendapatkan jaminan distribusi melalui sistem yang lebih tertata dan terawasi.

Sementara itu, penelitian Mardhiah et al. (2009) menyoroti ketidaksesuaian alokasi pupuk berdasarkan tipologi lahan di Sumatera Selatan. Meskipun hasil tersebut sejalan dengan temuan penulis bahwa ketidaksesuaian alokasi dan kebutuhan di lapangan menjadi masalah utama, namun pendekatan yang digunakan oleh Mardhiah lebih berfokus pada dimensi teknis dan spasial. Penelitian ini memperluas analisis dengan menunjukkan bahwa distribusi yang tepat bukan hanya soal data lahan, tetapi juga keterlibatan aktif aktor lokal dalam menyusun dan menyepakati alokasi tersebut secara kolaboratif.

Hasil penelitian Suniarti (2024) menggambarkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian data sebagai penyebab utama buruknya distribusi pupuk. Meskipun temuan tersebut juga terlihat di Kecamatan Sibulue, penelitian ini menambahkan bahwa penguatan transparansi dan forum pengawasan terbatas seperti KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dapat menjadi solusi konkret. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menilai efektivitas mekanisme korektif yang sudah diterapkan, seperti evaluasi tahunan dan dialog tatap muka antar aktor.

Penelitian Sriski et al. (2024) menilai distribusi pupuk berdasarkan prinsip 6Tepat (tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga). Penelitian ini juga menemukan bahwa ketepatan waktu dan distribusi menjadi kendala umum, sama seperti di Kecamatan Sibulue. Namun, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan prinsip “tepat” tidak hanya bergantung pada

manajemen logistik, tetapi juga pada kekuatan desain institusi, partisipasi kelompok tani, dan keterbukaan informasi dari pemerintah. Dengan demikian, pendekatan distribusi tidak bisa hanya teknokratis, tetapi juga harus berbasis partisipasi dan kolaborasi.

Temuan dari Djemma et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas distribusi sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pihak, namun studi tersebut belum menjelaskan bagaimana proses sinergi tersebut dibangun dan dipelihara. Penelitian ini melengkapi aspek tersebut dengan mengidentifikasi praktik *facilitative leadership*, forum terbatas, dan proses saling pengertian yang secara nyata terbentuk dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Sibulue. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi bukanlah hasil yang terjadi secara alami, tetapi perlu difasilitasi melalui struktur kolaboratif yang konkret dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru tidak hanya dalam mengidentifikasi persoalan distribusi pupuk bersubsidi, tetapi juga dalam memformulasikan strategi kolaboratif yang dapat diadopsi oleh daerah lain. Kolaborasi antara aktor-aktor lokal, transparansi data, forum pengawasan, serta penguatan peran pemimpin sebagai fasilitator menjadi faktor kunci yang membedakan keberhasilan di lapangan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penerapan *collaborative governance* tidak hanya bersifat konseptual, tetapi dapat dioperasionalkan melalui kebijakan dan praktik teknis yang disesuaikan dengan kondisi lokal, sebagaimana terbukti dalam konteks Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan strategi *Collaborative Governance* di kecamatan sibulue Kabupaten Bone tergolong cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang rutin antar pemangku kepentingan, pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara konsisten, serta adanya komitmen ber-sama dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pengecer, dan petani dalam menjalankan peran sesuai aturan yang berlaku. Beberapa tantangan masih ditemui dalam pelaksanaannya, di antaranya keterbatasan sumber daya, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan logistik, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Selain itu, permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima pupuk, kelangkaan pupuk bersubsidi, dan harga jual di atas HET juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem distribusi yang adil dan efisien. Solusi Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi melalui pendekatan kolaboratif, beberapa langkah dapat ditempuh. Di antaranya adalah mengoptimalkan peran masing-masing aktor dalam proses distribusi agar tercipta sinergi yang lebih baik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengawasan yang berkelanjutan sangat penting untuk menunjang kinerja pelaksana di lapangan. Tak kalah penting, memperkuat koordinasi lintas sektor serta memanfaatkan teknologi informasi juga menjadi kunci dalam menciptakan strategi yang baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja yakni di Dinas Pertanian Kabupaten Bone sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Strategi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tanaman Padi di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bone beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Darmawaty, D., Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 130-143. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1349>
- Djemma, L. A., Nuryanti, D. M., & Zainuddin, A. (2024). Efektivitas pendistribusian program pupuk bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/2990>
- Eaton, S. E., Stoesz, B. M., Crossman, K., Garwood, K., & McKenzie, A. (2022). Faculty perspectives of academic integrity during COVID-19: A mixed methods study of four Canadian universities. *Canadian Journal of Higher Education*, 52(3), 42–58. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85148644054>
- Fatimah, Y. (2019). Peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penempatan pejabat struktural di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal MSDA*, 7(2), 103–125. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/article/view/1149>
- Jacob, U. S., Fredrick, V. A., & Pillay, J. (2025). Aggressive behavior among individuals with intellectual disability: Predictive factor analysis. *International Journal of Diversity in Education*, 25(2), 1–21. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85218859740>
- Kaligis, D., Syafri, W., & Mansyur, M. (2020). Analisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 34-47. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1343>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative research methods* (5th ed.). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/qualitative-research-methods-9780190304302>
- Mardhiah, M., Hasan, M. Y., & Hakim, M. M. (2009). Analisis distribusi pupuk bersubsidi pada usahatani padi sawah berdasarkan tipologi lahan di Provinsi Sumatera Selatan [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Repositori Universitas Sriwijaya. <https://repository.unsri.ac.id/104872/>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nofianti, T., Yulianti, Y., Sukei, K., & Purnomo, M. (2024). Strategi resiliensi petani terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi: Kasus rumah tangga petani padi di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan [Disertasi, Universitas Brawijaya]. Repositori Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/234923/>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Ruskarini, D. (2017). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Surabaya: Cakra Ilmu.

Simangunsong, F. (2017). Metode penelitian sosial kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Sriski, G. S., Taridala, S. A. A., & Abdullah, W. G. (2024). Analisis saluran distribusi pupuk bersubsidi pada petani padi sawah di Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 1658–1665. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15138>

Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suniarti, S. (2024). Analisis mekanisme distribusi pupuk bersubsidi pada usaha tani padi sawah: Studi kasus Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara [Skripsi, IAIN Palopo]. Repositori IAIN Palopo. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8675/>

Valdivia-Yábar, S. V., & López, C. H. (2022). Digital uses of students and college success. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(18), 223–238. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85146751166>

